

PENGUATAN KELUARGA MISKIN MELALUI PEGEMBANGAN MODAL SOSIAL

Bambang Rustanto

Abstract. Poverty as a social Phenomena related with economy, social, culture and political dimension. Therefore, need all this dimension to handle that matter so that the poor people could release from the poverty circle. The approaching that should be done by strengthening social capital such social groups that create and develop in their environment. Through this, they could develop all their potencial to release them from the poverty.

Key word : poverty, empowerment, social capital.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan multi-dimensional, karena tidak saja berkaitan dengan faktor ekonomi, akan tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, budaya dan politik. Untuk itu, dalam penanganannya akan menghadapi kesulitan apabila fenomena kemiskinan ini diobyektifkan dalam bentuk angka-angka. Sebagai contoh, pada pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan yang sampai kini menjadi perdebatan. Dengan kata lain, tidaklah mudah untuk menentukan berapa rupiah pendapatan yang harus dimiliki oleh setiap orang, agar terhindar dari batas garis kemiskinan. Jadi, kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan kuantitatif dengan menghitung pendapatan rumah tangga, tetapi juga kualitatif yang berkenaan dengan sosial-budaya, seperti: "nilai nrimo", takdir dan nasib.

Biro Pusat Statistik (2005) untuk program kompensasi BBM memberikan pengukuran garis kemiskinan berdasarkan

besarnya kalori yang dibutuhkan bagi setiap keluarga. Keluarga miskin di perkotaan membutuhkan 2100 kalori setiap umpi dengan satu keluarga antara 3 - 5 umpi atau setara dengan Rp. 275.000,-. Sedangkan di perdesaan membutuhkan 1.700 kalori setiap umpi dengan satu keluarga antara 3 - 5 umpi atau setara dengan Rp.175.000,-.

Oleh karena ukuran obyektif kemiskinan sangat bervariasi, maka perlu berhati-hati, dan kritis terhadap penggunaan alat ukur. Selain ukuran yang diajukan cukup banyak, pada kenyataannya kebutuhan manusia tidak hanya diukur secara ekonomi semata. Maka dari itu, pada penentuan garis kemiskinan yang direduksi dari aspek ekonomi semata tidak akan memberikan pemecahan masalah pada persoalan dimensi lainnya seperti budaya dan politik.

Khusus pada kemiskinan di perkotaan, para ahli berpendapat, bahwa berbagai dimensi dapat ditemukan di dalam konsep kemiskinan, yaitu (Ellis,1994) :

1. Dimensi Ekonomi.
Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material seperti pangan, sandang, perumahan dan kesehatan.
2. Dimensi Sosial dan Budaya.
Dimensi ini menjelma dalam budaya kemiskinan yang dapat ditunjukkan dalam nilai-nilai apatis, apolitis, fatalistik dan ketidakberdayaan.
3. Dimensi Struktural dan Politik.
Dimensi ini menjelma dalam kekuatan-kekuatan politik terutama saluran-saluran dan kedudukan politik.

Dimensi-dimensi kemiskinan di perkotaan tersebut merupakan landasan bahwa dalam upaya penanganan kemiskinan (khususnya di perkotaan), perlu mempertimbangkan ketiga dimensi tersebut secara simultan. Jika tidak, maka penanganan kemiskinan tidak akan memberikan hasil yang optimal.

II. MODAL SOSIAL DAN PENANGANAN KEMISKIANAN

Menangani kemiskinan di perkotaan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan orang miskin, sehingga mereka dapat hidup secara mandiri. Memberdayakan orang miskin ini dapat dilakukan dengan pendekatan pengembangan modal sosial melalui kelompok-kelompok yang secara alamiah mereka tumbuhkan. Pemberdayaan melalui kelompok ini dalam pengembangan modal sosial dalam pengertian ekonomi, institusi, sosial, dan lingkungan serta budaya dan politik.

Keluarga miskin di perkotaan pada dasarnya merupakan lapisan yang mempunyai potensi dan modal sosial yang belum dikembangkan. Tetapi karena

struktur politik telah memendam potensi dan modal sosial kelompok keluarga miskin, menyebabkan mereka tidak dapat mengeluarkan dirinya dari jebakan kemiskinan. Pengembangan modal sosial melalui kelompok-kelompok sosial ini dapat menjangkau, baik pada level mikro, meso maupun makro. Semakin tinggi pengembangan modal sosial yang dimiliki keluarga miskin, maka semakin tinggi pula akses ekonomi dan akses sosial maupun politik.

A. Modal Sosial sebagai Penguatan Sosial

Modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan proyek pembangunan, terutama terlihat dari kemampuan komunitas dalam merajut institusi dan pranata (*crafting institution*) (Ostrom, 1992). Studi tentang modal sosial banyak dikembangkan oleh Bank Dunia, karena dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (World Bank 1999). Selain itu, menurut Putnam (2000) modal sosial mempunyai "kekuatan dan akibat yang dapat diperhitungkan pada banyak aspek yang berbeda dalam kehidupan manusia." Kekuatan dan akibat yang dapat diperhitungkan tersebut meliputi rendahnya angka kejahatan (Halpem, 1999, Putnam, 2000), derajat kesehatan yang lebih baik (Wilkinson, 1996), peningkatan usia harapan hidup (Putnam, 2000) pencapaian prestasi bidang pendidikan (Coleman, 1988), peningkatan derajat pendapatan (Wilkinson, 1996), pencapaian prestasi ekonomi melalui peningkatan kepercayaan dan penurunan biaya transaksi (Fukuyama, 1995), serta meningkatkan kesejahteraan keluarga (Grootaert, 1998) (lihat en.wikipedia.org/wiki/Social_capital).

Robert Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-

norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*), yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu *social networks* “*networks of civic engagement*”-ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Bahkan lebih jauh, Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan).

Pierre Bourdieu (1970) mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”.

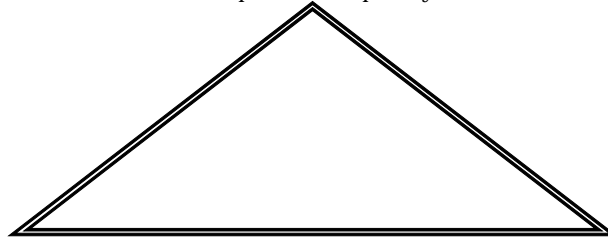
Bourdieu (1970) menegaskan tentang modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk *social capital* (modal sosial) berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya. Ia menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapat seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu, seperti : paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu.

Berbagai pandangan tentang modal sosial tersebut bukan sesuatu yang bertentangan. Ada keterkaitan dan saling mengisi sebagai sebuah alat analisa penampakan modal sosial di masyarakat. Modal sosial bisa berwujud sebuah mekanisme yang mampu mengolah potensi menjadi sebuah kekuatan riil guna menunjang pengembangan masyarakat.

Menyimak berbagai pengertian modal sosial yang sudah dikemukakan di atas, kita bisa mendapatkan pengertian modal sosial yang lebih luas yaitu berupa jaringan sosial, atau sekelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan simpati dan kewajiban, serta oleh norma pertukaran dan *civic engagement*. Jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusi yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut. Di sini, dalam level mekanismenya, modal sosial dapat mengambil bentuk kerjasama. Kerjasama sendiri adalah upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik ketika tingkah laku seseorang atau kelompok dianggap menjadi hambatan oleh orang atau kelompok lain.

Berdasarkan eksplorasi di atas bisa ditemukan komponen modal sosial dalam tiga level yaitu pada level nilai, institusi, dan mekanisme. Secara ringkas hubungan ketiga level modal sosial tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Woolcock :
Social Bounding
Nilai, Kultur, Persepsi:
Simpati dan kepercayaan



Social linking
Institusi : (kelompok)
Ikatan yang terdapat
dalam komunitas
lokal, jaringan dan
asosiasi

Social Bridging
**Mekanisme : (aksi
kelompok)**
Tingkah laku
kerjasama, sinergi

Selanjutnya Woolcock (2001) membedakan tiga tipe modal sosial:

1. Perikat Sosial (***Social Bounding***)

Pengertian *social bounding* adalah, tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. Misalnya, kebanyakan anggota keluarga mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga yang lain.

Hubungan kekerabatan ini bisa menyebabkan adanya rasa empati atau kebersamaan. Bisa juga mewujudkan rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang mereka percaya. *Rule of law* merupakan kesepakatan bersama dalam masyarakat, bentuk aturan ini bisa formal dengan sanksi yang jelas seperti aturan perundang-undangan.

Namun ada juga sanksi nonformal yang akan diberikan masyarakat kepada anggota masyarakat berupa pengucilan, rasa tidak hormat, bahkan dianggap tidak ada dalam suatu lingkungan komunitasnya. Ini menimbulkan suatu ketakutan dari setiap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan bagian dari tanggung jawab sosialnya.

Norma-norma tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan itu, perlu diingat bahwa modal sosial ada yang memberikan pengaruh yang baik dan kurang baik.

Kemudian, berkenaan dengan tradisi atau adat-istiadat (*custom*) yang masih tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat. Adat-istiadat (*custom*) merupakan tata kelakuan yang kekal serta memiliki integrasi yang kuat dengan pola-pola perilaku

masyarakat, mempunyai kekuatan untuk mengikat dengan sanksi.

2. Institusi atau Mekanisme (*Social Bridging*)

Social Bridging merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompok. Jembatan sosial ini muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada di masyarakat Stephen Aldridge menggambarkan sebagai “pelumas sosial”, yaitu pelancar dari roda-roda penghambat jalannya modal sosial dalam sebuah komunitas. Wilayah kerjanya lebih luas daripada *social bounding*. Dia bisa bekerja lintas kelompok etnis, maupun kelompok kepentingan. *Social Bridging* bisa juga dilihat dengan adanya keterlibatan umum, sebagai warga negara (*civic engagement*), asosiasi, dan jaringan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat agar mampu menggali dan memaksimalkan kekuatan yang mereka miliki, baik SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam) dapat dicapai.

Ketercapaiannya melalui interaksi sosial sebagai modal utama. Dengan demikian institusi sosial tetap eksis sebagai tempat artikulasi kepentingan bagi masyarakat. Interaksi yang terjalin bisa berwujud kerjasama atau sinergi antar kelompok, sebagai upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik.

Kapasitas modal sosial yang termanifestasikan dalam ketiga bentuk modal sosial tersebut (nilai, institusi, dan mekanisme) dapat memfasilitasi dan menjadi arena dalam hubungan antar kelompok yang berasal dari latar

belakang berbeda, baik dari sudut etnis, agama, maupun tingkatan sosial ekonomi. Ketidakmampuan untuk membangun nilai, institusi, dan mekanisme bersifat lintas kelompok akan membuat masyarakat yang bersangkutan tidak mampu mengembangkan modal sosial untuk membangun integrasi sosial.

3. Hubungan atau jaringan sosial (*Social Linking*)

Merupakan hubungan sosial yang dicirikan dengan adanya hubungan di antara beberapa kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya, hubungan antara elite politik dengan masyarakat umum. Dalam hal ini elite politik yang dipandang khalayak sebagai *public figure*, dan mempunyai status sosial lebih tinggi dari pada masyarakat kebanyakan. Namun mereka sama-sama mempunyai kepentingan untuk mengadakan hubungan. Elite politik membutuhkan massa untuk mendapatkan suara dan mendukungnya. Sementara masyarakat berusaha mendapatkan orang yang dipercaya sebagai penyalur aspirasinya.

Pada dasarnya tipe modal sosial ini dapat bekerja tergantung dari keadaannya. Ia dapat bekerja dalam kelemahan maupun kelebihan dalam suatu masyarakat. Ia dapat digunakan dan dijadikan pendukung sekaligus penghambat dalam ikatan sosial tergantung bagaimana individu dan masyarakat memaknainya.

Pengembangan modal sosial dalam penguatan sosial adalah terkait dengan prinsip pengembangan kelompok sosial sebagai bentuk pelayanan masyarakat (*community service*). Artinya, pelayanan yang harus dapat memberikan kepuasan

kepada semua kelompok dalam masyarakat secara keseluruhan tanpa membedakan kelas sosialnya. Menurut Narayanan (2003; lihat en.wikipedia.org/wiki/Sosial_capital), ada tiga prinsip penguatan sosial meliputi :

1. *Demand Response Approach*

Artinya, adanya kelompok sosial sebagai respon atas tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang bersifat kondisional, seperti masyarakat yang membutuhkan sekolah dasar jangan disediakan puskesmas. Atau sekolah dasar didirikan di lingkungan masyarakat yang memiliki anak usia wajib belajar. Jadi tidak serta merta pelayanan sekolah dasar didirikan padahal masyarakat setempat tidak membutuhkannya.

2. *Community As Stakeholder*

Artinya, masyarakat adalah pihak yang berkepentingan atau masyarakat menjadi "pemilik" dari kelompok sosial tersebut. Dengan demikian masyarakat akan ikut membiayai, menentukan kebijakan, menentukan standar prosedur operasional dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan. Masyarakat diharapkan akan merasa ikut memiliki pelayanan tersebut, dan dengan sendirinya akan ikut memelihara. Sebagai contoh, kalau masyarakat memerlukan sekolah dasar, maka mereka juga harus merasa memelihara sekolah dasar tersebut.

3. *Participatory Action*

Artinya, masyarakat perlu terlibat menentukan keputusan dalam setiap kegiatan untuk penyelenggaraan pelayanan. Untuk mengatur keterlibatan masyarakat tersebut, perlu membentuk forum

masyarakat atau sejenisnya yang menjadi wadah dan berperan menjembatani kepentingan masyarakat dengan lembaga pelayanan.

Untuk menjalankan ketiga prinsip dasar pengembangan kelompok sosial tersebut diperlukan pelibatan berbagai pihak. Menurut Netting (1999) pelibatan berbagai pihak tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tingkatan relasi institusional sebagai berikut:

1. Komunikasi

Pada tingkat ini relasi institusional baru sebatas di lingkungan kelompok sosial itu sendiri. Penyebaran informasi dilakukan di dalam interaksi anggota kelompok sosial, baik yang bersifat formal maupun informal dan komunikasi terbatas lainnya.

2. Kooperasi

Relasi institusional ini sudah melibatkan kelompok sosial lainnya, terutama perangkat sosial yang sejenis untuk melaksanakan program-program yang mempunyai tujuan sama. Dengan demikian satu kelompok sosial akan memperkuat kelompok sosial lainnya.

3. Koordinasi

Relasi institusional diperluas lagi, dimana dua atau lebih kelompok sosial saling berkoordinasi dan saling memberikan informasi, memberikan saran dan saling membuat rujukan.

4. Kolaborasi

Relasi institusional dilakukan oleh dua atau lebih kelompok sosial dimana mereka membangun koalisi. Koalisi adalah suatu asosiasi yang berkembang secara longgar dari institusi yang memiliki pelayanan yang

sama dan tertarik untuk melakukan kerja sama.

5. Konfederasi

Relasi institusional dilakukan oleh dua atau lebih kelompok sosial yang terbentuk secara horizontal maupun vertikal.

B. Penguatan Sosial bagi Keluarga Miskin

Penguatan sosial dalam tinjauan sosiologi merupakan obyek utama dari studi kemasyarakatan. Setiap orang atau keluarga melakukan pengelompokan sosial atas dasar masalah dan kebutuhan masing-masing. Kelompok sosial dianggap sebagai alat sosial bagi warga masyarakat untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya secara lebih efisien, dengan cara mengkoordinasikan sejumlah tindakan. Dikemukakan oleh Etzioni (1992), bahwa melalui kelompok sosial dapat dikoordinasikan sejumlah besar tindakan manusia, baik sebagai warga maupun keluarga. Kelompok sosial dapat menjadi alat sosial yang handal untuk melayani, serta memenuhi berbagai kebutuhan suatu masyarakat secara lebih efisien, dibandingkan hanya dilakukan sendiri-sendiri.

Keikutsertaan warga dalam kelompok sosial dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan keluarga, dan pengalaman ikut dalam kelompok sosial dapat mempengaruhi tindakan sosial dari masing-masing anggota kelompok sosial tersebut. Trecker (1990) mengemukakan pengaruh keikutsertaan di dalam kelompok sosial terhadap tindakan sosial anggota kelompok, sebagai berikut:

1. Pengalaman dalam kelompok sosial dapat merubah aspirasi-aspirasi dan pola-pola tingkah laku anggota.
2. Pengalaman yang diperoleh dalam kelompok sosial dapat mengubah

kebiasaan – kebiasaan kerja dan cara-cara hidup yang lain.

3. Pengalaman dalam kelompok sosial memberi pengaruh yang besar terhadap persepsi anggota terhadap situasi tertentu.
4. Kelompok sosial cenderung menyediakan dukungan-dukungan psikologis bagi individu dan membantu mereka dalam mengemukakan dirinya, baik yang bersifat positif maupun negatif.
5. Penguatan melalui kelompok sosial dapat menjadikan dukungan sosial, munculnya motivasi, dan untuk mampu menerima perubahan-perubahan.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata juga telah membawa paradigma baru yang lebih memberi tempat kepada masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan termasuk pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri melalui kelompok-kelompok sosial. Jim Ife (2002) menjelaskan bahwa terjadi *Change from Below* dalam arti pemerintah telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan dalam rangka menentukan nasibnya sendiri. Mereka dipandang sebagai aktor yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Pernyataan di atas sesuai dengan pandangan Jim Ife tentang pemberdayaan. Ife mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses pendistribusian kekuasaan dari yang “memiliki” kepada yang “tidak/kurang memiliki” baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat. Dengan pendistribusian tersebut terkandung makna adanya suatu keyakinan bahwa pihak yang menerima pendistribusian kekuasaan

memiliki potensi dan kekuatan serta sumber-sumber untuk mengambil keputusan dalam menentukan nasibnya sendiri.

Pendekatan partisipatif dalam pengembangan masyarakat mengarahkan kesadaran kepada warga masyarakat untuk mengelompokkan diri dalam kelompok sosial. Melalui kelompok sosial akan dapat ditumbuhkan adanya prinsip hubungan kesetaraan dan kebersamaan antara warga masyarakat dengan pemerintah, swasta, maupun organisasi sosial. Aspek kesadaran inilah yang membedakan antara proses pendekatan pengembangan masyarakat yang mengandalkan pola hubungan subjek-objek (masyarakat pasif) dengan proses pendekatan partisipatif yang mengedepankan pola hubungan subjek-subjek (masyarakat aktif).

Menurut Ashley (1999) dan Mukherjee (2002), *Sustainable Livelihood (Sli)* merupakan salah satu teknik penguatan kelompok secara partisipatif dalam pengembangan modal sosial bagi keluarga miskin. **Sli** memiliki prinsip dasar dalam pengembangan modal sosial bagi keluarga miskin yaitu :

1. *People Centered*, diartikan sebagai bentuk pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui keterlibatan keluarga miskin itu sendiri
2. *Responsive and Participatory*, diartikan sebagai cara bagi keluarga miskin itu sendiri yang menjadi aktor utama didalam memprioritaskan kegiatan bagi kehidupannya.
3. *Multi Level*, diartikan sebagai bentuk program pengentasan bagi keluarga miskin dapat dilakukan dalam beberapa tingkat yaitu tingkat mikro dalam penguatan kelompok, tingkat meso dalam organisasi pelayanan

sosial dan tingkat makro dalam kebijakan sosial.

4. *Conducive In Partnership*, diartikan sebagai rancangan program dapat dilakukan dengan melibatkan sektor pemerintah maupun swasta.
5. *Sustainable*, yang diartikan bahwa ada 4 dimensi dalam kegiatan pengentasan keluarga miskin yaitu kegiatan ekonomi, institusi, sosial, dan lingkungan dan keempatnya mempunyai porsi yang seimbang.
6. *Dynamic*, yang diartikan program pengentasan keluarga miskin yang mengikuti situasi dinamis yang berkembang secara terus menerus dalam perubahan sosial masyarakat.

Ada 3 alat utama dalam penguatan kelompok dengan teknik **Sli** dalam pengembangan modal sosial bagi keluarga miskin yaitu:

1. Pemetaan Sosial (*Social Mapping*)

Ada dua kegiatan yang dilakukan dalam *social mapping*, ini yaitu:

- a Melakukan asesmen tentang modal sosial yang dimiliki oleh keluarga miskin.
- b Hasil asesmen modal sosial tersebut dibuat pemetaan potensi dan masalah dari keluarga miskin yang dilihat dari 3 aspek, yaitu :
 - 1). Aset keluarga
Yaitu melihat potensi dan masalah yang terkait dengan kondisi kehidupan di dalam rumah tangga dari keluarga miskin.
 - 2). Kontek kerentanan
Yaitu melihat potensi dan masalah yang terkait dengan kondisi kehidupan di luar rumah tangga

keluarga miskin terutama di lingkungan masyarakat.

3). Struktur dan proses transformasi.

Yaitu melihat potensi dan masalah yang terkait dengan kebijakan dan program pengentasan bagi keluarga miskin.

Hasil pemetaan sosial pada keluarga miskin ini kemudian dianalisis untuk dijadikan bahan rujukan bagi rancangan kegiatan selanjutnya.

2. Rencana Aksi

Adapun langkah-langkah perencanaan untuk program-program strategis yang terkait dengan pengentasan keluarga miskin dalam empat dimensi utama, yaitu kegiatan ekonomi, institusi, sosial dan lingkungan hidup. Rencana program tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

a. Merumuskan nama program

Program yang dirumuskan bersifat spesifik, terukur, mudah untuk dicapai, sesuai dengan realita, ada limit waktunya (SMART)

b. Merumuskan tujuan program

Tujuan yang ingin dicapai juga memungkinkan untuk dicapai berdasarkan sumber daya yang dimiliki

c. Menentukan sasaran program .

d. Sasarannya jelas, terfokus, dan real.

e. Merumuskan Rincian kegiatan untuk merealisasikan program

Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan. Kegiatan apa saja yang dibutuhkan untuk merealisasikan dan mencapai kesuksesan program.

3. Monitoring dan Evaluasi

Yaitu kegiatan untuk menilai dan memantau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun oleh kelompok keluarga miskin. Kegiatan ini terbagi dua yaitu:

a. Monitoring proses

Yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memantau keberlangsungan proses dari tahap pemetaan sosial, perencanaan dan implementasi.

b. Evaluasi hasil

Yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menilai hasil yang telah dicapai dari proses-proses kegiatan yang dilaksanakan.

III. PENUTUP

Penguatan modal sosial yang tumbuh dan berkembang dalam bentuk kelompok-kelompok sosial, merupakan salah satu pendekatan yang perlu dikembangkan dalam penanganan kemiskinan. Berdasarkan pengalaman dari negara-negara berkembang, pendekatan ini dinilai efektif, karena mampu memberdayakan rumah tangga miskin, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Di dalam pendekatan ini, individu-individu sebagai anggota kelompok mengalami proses belajar sosial, bagaimana mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, melalui pendekatan ini, setiap individu akan terlibat belajar mengembangkan perilaku pro sosial secara efektif guna mengatasi masalah maupun memenuhi kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djameludin, 2003, *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar UGM, Yogyakarta, 3 Mei 2003.
- Ashley, 1999, *Social Structure In Development Country*, Singapore: Sun Glass.
- Bungin, Burhan, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media.
- Coleman, James S, 1988, *Social Capital in Creation of Human Capital*, American: Journal of Sociology, 94, S 95 – S 120.
- Dasgupta, Partha dan Serageldin, Ismail, 2000, *Social Capital: A Multifaceted Perspective*, Washington D.C: The World Bank.
- Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB dan Program Pasca Sarjana IPB, 2005, *Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial*, Bogor: IPB Bogor.
- En.wikipedia.org/wiki/ Social_capital.
- Etzioni, 1992, *State And Civil Society*, New York: Long Mann.
- Fukuyama, F, 1995, *Trust : The Social Values and the Creation of Prosperity*, New York: Free Press.
- Hermawanti, Mefi, dan Rinandari, Hesti, 2003, *Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat*, Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Ife, Jim, 1995, *Community Development: Creating Community Alternative-Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman House.
- Lawang, Robert, MZ, 2005, *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*, Jakarta: Fisip UI Press.
- Mukherjee, 2002, *Sustainable Livelihood In Indonesia*, Jakarta: World Bank.
- Netting, 1999, *Social Work Macro*, London: Mac Millan.
- Neuman, Lawrence, 2000, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, USA: A Pearson Education Company.
- Nugroho, Iwan, 1997, “Modal Sosial dan Perkembangan Kota”, Prisma, No 6/ 1997, Jakarta: LP3ES.
- Pierre Boudieu, 1970, *Language and Symbolic Power*, Cambridge: Harvard Press.
- Putman, Robert, 1993, 2000 “*The Prosperous Community – Social Capital and Public Life*”, American.
- Robert Putnam, 1993, *Social Capital Frame Work*, New York : Long Mann.
- Rogovsky, Nikolai, 2002, “*Corporate Community Involvement Programmes: Partnerships for Jobs and Development: Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital*”, Washington D.C: The World Bank.
- Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Trecker, 1990, *Community Development*, London: Mac Millan.
- Woolcock, 2001, *Community Services, Theory and Concep*, Cambridge: Harvard Press.

Drs. Bambang Rustanto, M.Hum, Pengajar pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, Direktur LSM Kusuma di Jakarta, dan kandidat doctor program Sosiologi di Universitas Indonesia.